

Golkar dan Demokrat Tidak Ada Masalah

Yulan Mirza

Borneo Tribune, Pontianak

Anggota Badan Anggaran (Banang) Partai Golkar dan Demokrat menilai laporan Banang terhadap pertanggungjawaban alokasi APBD tahun 2010 yang dibacakan Thomas Alexander di ruang Balairung, DPRD Kalbar, Kamis (4/8) itu, dinilai tidak ada masalah.

Mengingat isi laporan itu tidak jauh berbeda dengan hasil rapat kerja rapat anggaran antara eksekutif dan legislative yang digelar Rabu (3/8) kemarin.

Anggota Badan Anggaran Fraksi Partai Golkar, Awang Sofian Razali mengatakan dalam mekanisme rapat kerja beberapa hari yang lalu itu, ada tanggapan fraksi DPRD Kalbar melalui pe-

mandangan umum yang tidak dijawab oleh Gubernur Kalbar. "Itu hak gubernur. Dan silahkan saja," jelas Awang, Kamis (4/8) kemarin.

Awang juga mengakui bahwa draft usulan laporan Badan Anggaran itu tidak dibahas terlebih dahulu di kalangan internal Badan Anggaran dan laporan Banang ini nantinya akan menjadi hasil dari pandangan akhir seluruh fraksi. "Ikut pembahasan namun draft usulan tidak disampaikan duluan kepada anggota badan anggaran," ucap legislator Partai Golkar ini.

Usai usulan laporan Badan Anggaran itu disampaikan, lanjut Awang, maka usulan itu nantinya akan ditelaah oleh masing-masing fraksinya. Dan setiap fraksi memiliki sikapnya masing-masing.

"Itu sebenarnya menjadi domain fraksi sebenarnya. Jadi tidak ada usulan draft Badan Anggaran itu dibicarakan ke fraksi. Dan itu jangan dicampuradukan," paparnya.

Sementara anggota Banang Fraksi Partai Demokrat, Ary Pudjyanti menguraikan laporan yang disampaikan itu tidak jauh berbeda dengan rapat kerja Badan Anggaran. Namun, Ary mengakui bahwa dalam laporan itu masih ada permasalahan yang belum bisa ditangani secara jauh. Seperti penanganan permasalahan aset.

"Permasalahan aset ini diakui oleh pihak eksekutif dinilai cukup kompleks. Dan ini menjadi salah satu indikator catatan dari BPK. Oleh sebab itu, permasalahan aset ini harus dibahas

lebih detail sejalan dengan hasil audit BPK," tegas Ari yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat, Kamis (4/8) kemarin.

Lebih lanjut Ary mengatakan penyelesaian masalah aset ini sebenarnya dapat dilakukan bersama-sama. Antara legislative dan BPK. Mengingat aset itu ada yang bergerak dan tidak bergerak.

"Kalau aset bergerak ini ada nilai penyusutan, nilai ekonomis. Dan ini harus ada kesepakatan bersama sejak awal. Kemudian dari hasil audit BPK ini dapat dijadikan pembanding. Apabila kalau perlu adanya apriisial. Sehingga pihak independen dapat membantu memberikan aset tersebut," ucap Ary.

Ary berkeyakinan dan menilai masa waktu di audit oleh BPK yang nantinya

akan memakan waktu selama 30 hari itu, tidak akan selesai. Karena permasalahan ini berkenaan dengan jangka waktu per tahun.

Ditanya sikap Fraksi Partai Demokrat lantaran tidak dilibatkan di dalam penyusunan laporan itu, Ary mengatakan tidak ada masalah. Mengingat sebelumnya dirinya mengikuti pembahasan badan anggaran dan hasil laporannya tidak jauh berbeda.

"Tetapi seyogyanya, sebelum disampaikan laporan badan anggaran itu ke sidang paripurna, setidaknya isi laporan itu dapat disampaikan terlebih dahulu kepada seluruh anggota badan anggaran. Tetapi kita tidak dilibatkan di dalam penyusunan laporan tersebut. Namun, esensi dan isinya sama," paparnya. □